

Pragmatics and Media Framing: A Comparative Study of Anies Baswedan's Reporting in Kompas and Republika

Pragmatik dan Bingkai Media: Studi Komparatif Pemberitaan Anies Baswedan di Kompas dan Republika

Muhammad Fauzi¹ Mulyanti Syas¹ Muhammad Husni¹ Lidya Arman¹

¹Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Corresponding Author. E-mail: muhammadfauzi@uinib.ac.id

DOI: 10.24036/jeli.v4i1.201

Submitted: 14/06/26

Revised: 25/06/26

Accepted: 07/07/26

Abstract

Mass media has a crucial role in shaping public perception through linguistic selection and news framing, especially in the run-up to political contests which often trigger polarization of viewpoints between media. This study aims to uncover the consistent use of pragmatic language and the dynamics of framing applied by Kompas and Republika in reporting on Anies Baswedan's progress during the crucial phase of 2022 to 2024. Through a qualitative approach with content analysis and critical discourse methods, data were collected from titles, leads, news bodies, opinion columns, and letters to the editor in both media, enriched by in-depth interviews with language aligners. The analysis integrates Searle's (1979) speech act theory, Leech's (1993) politeness principle, Pan and Kosicki's (1993) framing model, and Shoemaker and Reese's (2016) hierarchy of influence. The research findings reveal a systematic divergence: Kompas consistently dominates expressive speech acts of criticism and blame, often violating the maxims of acceptance and agreement, with a thematic frame linking policy to narratives of administrative irregularities. In contrast, Republika predominantly uses speech acts of praise and glorification, adheres to the maxims of generosity and humility, and constructs a frame emphasizing affirmation and leadership capabilities.

Keywords: *media framing, editorial ideology, political retrospective, speech acts*

Abstrak

Media massa memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi publik melalui seleksi kebahasaan dan pbingkai berita, terutama menjelang kontestasi politik yang sering kali memicu polarisasi sudut pandang antar-media. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar konsistensi penggunaan bahasa pragmatik serta dinamika framing yang diterapkan oleh Kompas dan Republika dalam memberitakan kiprah Anies Baswedan pada fase krusial 2022 hingga 2024. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dan wacana kritis, data dikumpulkan dari judul, lead, tubuh berita, kolom opini, serta surat pembaca pada kedua media, yang diperkaya dengan wawancara mendalam terhadap penyelaras bahasa. Analisis mengintegrasikan teori tindak tutur Searle (1979), prinsip kesantunan Leech (1993), model framing Pan dan Kosicki (1993), serta hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese (2016). Temuan penelitian mengungkap adanya divergensi sistematis: Kompas secara konsisten mendominasi tindak tutur ekspresif yang bersifat

mengkritik dan menyalahkan, sering kali melanggar maksim penerimaan dan kesepakatan, dengan bingkai tematik yang mengaitkan kebijakan dengan narasi penyimpangan administratif. Sebaliknya, Republika lebih banyak menggunakan tindak tutur yang memuji dan mengagungkan, mematuhi maksim kemurahan dan kerendahan hati, serta membangun bingkai yang menekankan afirmasi dan kapabilitas kepemimpinan.

Kata kunci: *framing media, ideologi redaksional, retrospektif politik, tindak tutur*

I. PENDAHULUAN

Media massa memegang peranan yang sangat vital dalam ekosistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai pilar keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, pers mengemban fungsi informatif, edukatif, transmisi nilai, serta kontrol sosial untuk membela kepentingan masyarakat sebagai bagian dari unsur sebuah negara (Shoemaker & Reese, 2016). Namun, transformasi media dari format cetak menuju platform digital yang masif justru seringkali membuat arus informasi menjadi tidak terkendali. Alih-alih menyajikan berita yang valid, faktual, dan objektif, sejumlah media cenderung mengedarkan narasi yang menggiring opini, menyudutkan kelompok tertentu, atau bahkan berfungsi sebagai alat propaganda yang memicu dualisme di masyarakat (Kun, 2022). Ketidaknetralan ini dapat dijelaskan melalui teori hierarki pengaruh (*hierarchy of influence*) yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese (2016). Teori ini menegaskan bahwa produksi informasi media tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh lima level yang saling berkaitan, yaitu individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, faktor eksternal, dan ideologi media (dominan). Ideologi inilah yang pada akhirnya membentuk kecenderungan media dalam membingkai realitas, terutama dalam isu-isu politik yang sensitif.

Pemahaman mengenai bagaimana media membentuk realitas tidak dapat dilepaskan dari teori konstruksi sosial yang menempatkan bahasa sebagai medium utama dalam proses pemberian makna. Menurut pendekatan constructionist, realitas bukanlah entitas yang berdiri sendiri dan siap untuk direkam secara pasif, melainkan sesuatu yang terus-menerus dibentuk melalui sistem tanda, narasi, dan interaksi diskursif. Dalam konteks media massa, Hall (1997) menjelaskan bahwa proses komunikasi bukanlah jalur linier dari pengirim ke penerima, melainkan sebuah sirkuit yang melibatkan produksi, sirkulasi, konsumsi, dan reproduksi makna. Setiap tahapan dalam sirkuit ini dipengaruhi oleh konteks ideologis, hubungan kekuasaan, dan kerangka kognitif yang dimiliki oleh produsen maupun konsumen berita. Ketika jurnalis memilih kata, menentukan judul, atau mengutip narasumber, mereka sebenarnya sedang melakukan proses encoding yang sarat dengan asumsi tentang apa yang dianggap penting, benar, atau relevan bagi khalayak. Proses decoding oleh pembaca pun tidak bersifat netral, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, afiliasi politik, dan pengalaman sebelumnya dalam mengonsumsi media. Oleh karena itu, berita tidak pernah sekadar melaporkan fakta, melainkan selalu menawarkan sebuah versi realitas yang telah diseleksi dan diberi penekanan tertentu.

Untuk membongkar lapisan makna yang tersembunyi di balik pilihan bahasa tersebut, teori pragmatik memberikan alat analisis yang sangat efektif. Pragmatik, sebagai cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara tuturan dan konteks penggunaannya, menyoroti bagaimana makna tidak hanya terletak pada struktur

gramatikal kalimat, tetapi juga pada maksud penutur, situasi komunikasi, dan dampak yang ditimbulkan. Austin (1962) memperkenalkan konsep tindak tutur yang membagi penggunaan bahasa menjadi tiga dimensi, yaitu lokusi (tindakan mengucapkan kalimat), ilokusi (tindakan yang dimaksudkan melalui pengucapan tersebut), dan perlokusi (dampak atau efek yang timbul pada pendengar). Inti dari kajian pragmatis terletak pada dimensi ilokusi, karena di sanalah terwujud daya komunikasi, intensi, serta sikap yang ingin dicapai oleh penutur. Kategorisasi Austin kemudian disempurnakan oleh Searle (1979), yang mengelompokkan tindak ilokusi ke dalam lima jenis yang lebih operasional, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dalam konteks pemberitaan media, tindak tutur ekspresif sering kali mendominasi kolom opini, kutipan tidak langsung, dan narasi jurnalis yang bersifat evaluatif, karena berfungsi untuk menyampaikan penilaian, dukungan, kekecewaan, atau kritik terhadap tokoh atau kebijakan yang sedang dibahas.

Namun demikian, penggunaan tindak tutur dalam ruang publik tidak boleh dilepaskan dari etika komunikasi, yang dalam linguistik pragmatik diwadahi melalui teori kesantunan berbahasa. Leech (1993) merumuskan enam maksim kesantunan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga hubungan sosial tetap harmonis dan meminimalkan gesekan interpersonal, meliputi maksim kebijaksanaan, kemurahan, penerimaan, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati. Dalam ranah pers, prinsip kesantunan pragmatis ini bukan sekadar pilihan gaya bahasa, melainkan sebuah kewajiban etis yang berjalan paralel dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hubungan etis tersebut mewujud pada kepatuhan Pasal 1 dan 3 KEJ mengenai iktikad baik dan akurasi berita yang sejalan dengan maksim kebijaksanaan dan kesepakatan untuk menghindari manipulasi yang memicu konflik interpersonal, serta Pasal 4 KEJ terkait larangan menghasut dan memfitnah yang merefleksikan maksim simpati untuk meminimalkan antipati publik. Selain itu, pemenuhan hak jawab dan koreksi pada Pasal 11 KEJ secara pragmatis merupakan bentuk maksim kerendahan hati demi menekan ego sektoral media. Meskipun landasan etis ini mengikat, dalam praktik jurnalistik sehari-hari, kepatuhan terhadap maksim-maksim ini sering kali berbenturan dengan logika industri berita yang mengutamakan konflik dan daya tarik. Media yang terlalu kritis cenderung melanggar maksim penerimaan dan kesepakatan dengan menonjolkan sisi negatif objek berita, sementara media yang terlalu afirmatif mungkin melanggar maksim kebijaksanaan jika mengabaikan fakta kritis demi menjaga citra positif tokoh yang diberitakan.

Di sisi lain, bagaimana media mengemas dan menyajikan tuturan tersebut ke dalam bentuk berita dapat dianalisis melalui teori framing. Goffman (1974) memperkenalkan konsep bingkai sebagai cara manusia mengorganisasi pengalaman sosial, namun dalam kajian komunikasi politik, framing merujuk pada proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari realitas untuk memandu interpretasi khalayak. Pan dan Kosicki (1993) mengembangkan model operasional yang membagi framing ke dalam empat struktur analitis, yaitu sintaksis (tata letak dan penekanan informasi), skrip (kelengkapan unsur berita), tematik (koherensi naratif dan pengaitan isu), dan retorik (pilihan diksi, idiom, dan elemen visual). Melengkapi model ini, Entman (1993) merumuskan empat fungsi framing yang lebih berorientasi pada dampak kognitif dan normatif, yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral, dan menyarankan solusi. Ketika keempat fungsi ini bekerja secara simultan, media

tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menetapkan agenda moral dan kerangka kebijakan yang dianggap sah oleh publik.

Hubungan antara pilihan bahasa pragmatis, strategi framing, dan produksi realitas media tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada kerangka hierarki pengaruh yang dikembangkan oleh Shoemaker dan Reese (2016). Teori ini menegaskan bahwa isi media dipengaruhi oleh lima level yang saling berinteraksi, di mana level organisasi dan ideologi sering kali menjadi penentu paling kuat dalam divergensi pemberitaan. Media yang dikelola oleh kelompok dengan afiliasi keagamaan tertentu akan secara alamiah memprioritaskan narasi yang selaras dengan nilai-nilai komunitasnya, sementara media yang berorientasi pada kelas menengah perkotaan dan nilai sekuler-humanis akan cenderung menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kritik institusional. Pengaruh ideologis ini mentransformasikan diri ke dalam preferensi kebahasaan yang spesifik, seperti media sekuler-humanis cenderung memanifestasikan kritiknya lewat dominasi tindak tutur ekspresif yang menyalahkan (*blaming*) serta kerap melanggar maksim penerimaan untuk membongkar anomali kebijakan, sedangkan media afiliasi keagamaan cenderung memproduksi tindak tutur ekspresif yang memuji (*praising*) serta mematuhi maksim kemurahan hati demi mengafirmasi kapabilitas sang tokoh. Kepemilikan media, sejarah pendirian, dan segmentasi audiens inilah yang membentuk apa yang disebut sebagai logika editorial, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak jurnalis dalam memilih diksi, menentukan sudut pandang, dan menyusun alur berita (Curran & Gurevitch, 1991). Dengan demikian, perbedaan pemberitaan antarmedia bukan sekadar variasi gaya jurnalistik, melainkan manifestasi dari pertarungan wacana yang lebih luas tentang bagaimana bentuk bahasa pragmatis digunakan sebagai instrumen utama pbingkaiian demi mendefinisikan realitas politik di ruang publik.

Fenomena pengaruh ideologi media ini terlihat sangat jelas menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, di mana isu-isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kembali mencuat ke permukaan dan dikaitkan dengan bakal calon presiden. Salah satu figur yang menjadi pusat gravitasi pemberitaan adalah Anies Baswedan. Berdasarkan berbagai survei elektabilitas pada periode tersebut, Anies secara konsisten berada di papan atas, menjadikannya sorotan intensif baik dari partai politik maupun media massa (Anindita, Jasit, & Asrinaldi, 2022). Rekam jejaknya, mulai dari menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga Gubernur DKI Jakarta dengan tagline "Maju Kotanya, Bahagia Warganya", memberikan bahan yang kaya untuk dikonstruksi oleh media (Adriyanto, 2018). Namun, keberadaan sosok potensial ini juga memicu perdebatan tajam, di mana pihak tertentu menilai kinerjanya tidak maksimal, sementara pihak lain membela bahwa janjinya telah ditepati (Raharjo, 2022).

Dalam mengonstruksi sosok Anies Baswedan, terdapat pertarungan wacana yang nyata antara media dengan latar belakang ideologis yang berbeda. Republika, yang lahir dari rahim Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), secara terbuka mengemban visi sebagai media umat yang mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, dan menjaga kepentingan umat Islam berdasarkan *Rahmatan Lil 'Alamin* (Munawaroh, 2014; Hamad, 2004). Sebaliknya, Kompas memiliki akar humanisme dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi objektivitas, independensi, dan bertujuan memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, yang kerap disinyalir membawa kepentingan Kristen Katolik (Mukhlis, 2022). Perbedaan fondasi

ideologis ini menciptakan dua realitas pemberitaan yang bertolak belakang mengenai figur yang sama, yang berpotensi memperkuat stereotipe dan politik identitas.

Divergensi ini semakin tajam ketika menyoroti isu-isu kontroversial, seperti dugaan tindakan korupsi pasca penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta. Kompas cenderung menyajikan berita dengan menyoroti aspek pemeriksaan dan potensi penyimpangan administratif, sementara Republika secara jelas membingkai peristiwa tersebut sebagai upaya framing politik identitas yang sengaja menargetkan Anies Baswedan (Raharjo, 2022; Jufrizal, Karerek, & Jamali, 2022). Ketegangan wacana ini bahkan sempat memicu respons dari tokoh politik lain, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menyerukan agar para tokoh menahan diri dan memilih diksi yang baik dalam memberikan kritik agar tidak menyinggung masyarakat, khususnya terkait isu SARA (Gunadha & Nofiana, 2022).

Fenomena pertarungan wacana ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi secara aktif menggunakan bahasa untuk membentuk opini dan persepsi publik. Pilihan diksi, struktur kalimat, dan konteks yang melingkupi pemberitaan menjadi instrumen strategis untuk merepresentasikan sosok Anies sesuai dengan visi, misi, serta idealisme yang dianut masing-masing media (Mahdi, 2015). Oleh karena itu, analisis bahasa pragmatik menjadi sangat krusial untuk membongkar bagaimana media memengaruhi pembaca. Meskipun penelitian terdahulu telah banyak mengupas framing politik atau analisis tekstual murni, terdapat keterbatasan kajian yang secara integratif membedah aspek pragmatisme bahasa sebagai hulu dari pembentukan bingkai media. Celah teoretis inilah yang menjadi kebaruan (novelty) dalam penelitian ini, yakni mendekonstruksi konstruksi realitas politik melalui perkawinan antara linguistik mikro dan makro-sosiologis media. Penelitian ini, yang diposisikan sebagai studi retrospektif, bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi pilihan bahasa pragmatik dan mendeskripsikan dinamika framing yang digunakan oleh Kompas dan Republika dalam memberitakan kiprah Anies Baswedan pada periode krusial 2022–2024.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dioperasikan melalui kerangka kerja linier-sistematis yang diawali dengan identifikasi bentuk tindak tutur untuk melihat intensi dasar teks, dilanjutkan dengan pembedahan kepatuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan guna mengukur etika komunikasi, yang kemudian diabstraksikan ke dalam model pembingkai (framing) untuk memetakan arah ideologi media, hingga bermuara pada interpretasi akhir atas realitas media yang dikonstruksi. Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan sudut pandang linguistik pragmatik, kajian media, dan peran pers untuk melahirkan pemikiran kontekstual mengenai kehidupan perpolitikan Indonesia yang cenderung terpolarisasi. Temuan ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah teoretis, tetapi juga berkontribusi nyata pada pengembangan literasi media, agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh narasi yang dualistik di era digital yang semakin kompleks.

II. METODE

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kedalaman pemahaman atas makna, konteks, dan proses konstruksi realitas dalam teks media. Desain penelitian yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif yang dipadukan dengan analisis wacana kritis, sehingga memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi pola linguistik, tetapi juga membongkar hubungan kekuasaan, bias

tersembunyi, dan strategi persuasi yang tertanam dalam struktur teks. Kombinasi ini sejalan dengan tradisi kajian media yang menekankan bahwa teks bukanlah cermin pasif realitas, melainkan produk dari serangkaian keputusan redaksional yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan yang dimuat di media Kompas dan Republika, baik versi cetak maupun online, pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024. Periode ini dipilih karena mencakup fase krusial menjelang deklarasi pencalonan, konsolidasi koalisi, kampanye terbuka, dan puncak kontestasi politik nasional, di mana intensitas pemberitaan terkait figur yang diteliti mencapai titik tertinggi. Unit analisis meliputi judul berita, *lead* atau teras berita, tubuh berita, kolom opini, serta surat pembaca yang secara langsung atau tidak langsung membahas kiprah, kebijakan, atau pernyataan publik Anies Baswedan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan metode baca-catat, di mana peneliti melakukan penelusuran sistematis pada arsip digital dan cetak, kemudian mencatat setiap unit tuturan yang relevan berdasarkan kategori tindak tutur, struktur framing, dan indikator kesantunan berbahasa.

Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan penyelaras bahasa atau editor redaksional dari kedua media. Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran strategis mereka dalam proses penyuntingan akhir, penetapan gaya bahasa, dan pengawasan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan fokus pada logika pemilihan diksi, pertimbangan editorial dalam penyusunan judul dan *lead*, penanganan isu sensitif, serta mekanisme kontrol kualitas untuk memastikan keseimbangan antara daya tarik berita dan prinsip objektivitas. Triangulasi antara analisis teks, hasil wawancara, dan kajian dokumen internal digunakan untuk memastikan keandalan temuan dan meminimalkan bias interpretasi peneliti.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana teks yang telah dikumpulkan disaring berdasarkan relevansi, kejelasan konteks, dan kekayaan informasi linguistik. Tahap kedua adalah pengkodean, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap unit tuturan ke dalam kategori tindak tutur Searle (1979), menilai kepatuhannya terhadap enam maksim kesantunan Leech (1993), serta memetakan struktur framing Pan dan Kosicki (1993). Pengkodean dilakukan secara iteratif, dengan peninjauan ulang untuk memastikan konsistensi kategorisasi. Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana pola-pola yang ditemukan diorganisasikan ke dalam matriks komparatif yang memungkinkan perbandingan langsung antara kedua media. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan dianalisis kembali dalam kerangka teori hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese (2016) untuk menguji konsistensi logis dan koherensi eksplanatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Tindak Tutur Ekspresif dan Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa

Analisis terhadap korpus data mengungkap adanya pola divergen yang sangat jelas dalam penggunaan tindak tutur ekspresif oleh kedua media. Tindak tutur ekspresif, yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap suatu peristiwa atau keadaan, mendominasi narasi jurnalis pada kolom berita analisis, opini, dan kutipan tidak langsung. Pada Kompas, tindak tutur yang paling sering muncul adalah bentuk menyalahkan, mengkritik, dan mempertanyakan. Tuturan ini sering kali diwujudkan

melalui penggunaan klausa interrogatif retorik, diksi yang bernada skeptis, dan penempatan kutipan yang menekankan kontroversi. Misalnya, dalam pemberitaan terkait penyelenggaraan acara internasional, narasi yang dibangun tidak hanya melaporkan fakta administratif, tetapi secara implisit menyalahkan ketidaksiapan penyelenggara dan mempertanyakan alokasi anggaran publik. Dari perspektif teori kesantunan Leech (1993), pola ini menunjukkan pelanggaran terhadap maksim penerimaan dan maksim kesepakatan, di mana media cenderung meminimalkan persetujuan terhadap langkah yang diambil objek berita dan memaksimalkan jarak kritis. Pelanggaran ini merupakan strategi redaksional yang disengaja untuk menonjolkan fungsi kontrol sosial pers, meskipun berisiko menggeser narasi dari verifikasi fakta menuju penilaian moral yang terburu-buru.

Sebaliknya, Republika menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam penggunaan tindak tutur ekspresif yang bersifat memuji, mengapresiasi, dan mengagungkan. Narasi yang dibangun lebih sering menyoroti capaian kebijakan, keteguhan prinsip, dan respons positif dari kelompok masyarakat tertentu. Diksi yang dipilih cenderung afirmatif, menggunakan kata sifat yang bernilai positif, dan menghindari konstruksi yang bersifat meragukan integritas atau kompetensi objek berita. Dalam kerangka kesantunan berbahasa, pola ini mematuhi maksim kemurahan dan maksim kerendahan hati, di mana media memaksimalkan pujian terhadap tokoh yang diberitakan dan meminimalkan penekanan pada diri jurnalis sebagai penilai. Namun, kepatuhan terhadap maksim ini justru menimbulkan pertanyaan kritis mengenai objektivitas jurnalistik. Ketika media terlalu konsisten dalam mematuhi prinsip kesantunan yang bersifat afirmatif, narasi berisiko kehilangan fungsi kritisnya dan bergeser menjadi instrumen legitimasi yang halus. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kesantunan berbahasa dalam konteks media tidak selalu identik dengan netralitas, ia dapat berfungsi sebagai alat persuasi yang justru mengaburkan kompleksitas realitas dengan menonjolkan satu sisi secara berlebihan (Chaer, 2010).

Dampak psikologis dan sosial dari divergensi tindak tutur ini sangat signifikan. Tindak tutur yang bersifat menyalahkan atau mempertanyakan, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk kontrol, dapat memicu defensif dan polarisasi di kalangan pembaca yang memiliki afiliasi emosional dengan objek berita. Di sisi lain, tuturan yang terlalu memuji dapat menciptakan ilusi konsensus dan mengabaikan suara kritis yang justru diperlukan untuk perbaikan kebijakan. Keduanya, jika tidak dikelola dengan prinsip proporsionalitas dan verifikasi ketat, berpotensi memperdalam fragmentasi wacana publik. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa bahasa dalam media massa tidak pernah bersifat instrumental semata, melainkan selalu mengandung muatan ideologis yang bekerja secara halus untuk membentuk afeksi dan loyalitas khalayak (Astriani & Prayitno, 2021).

2. Konstruksi Framing: Sintaksis, Tematik, dan Retoris

Penerapan model framing Pan dan Kosicki (1993) memperlihatkan bagaimana kedua media mengemas realitas yang sama ke dalam struktur naratif yang berbeda secara fundamental. Secara sintaksis, kedua media sama-sama mengikuti konvensi piramida terbalik, namun penekanan pada headline dan lead menciptakan impresi pertama yang bertolak belakang. Kompas sering menggunakan judul yang bersifat interrogatif atau mengandung kutipan parsial yang bernada skeptis, yang secara kognitif mengarahkan pembaca untuk meragukan klaim resmi. Struktur ini bekerja dengan menempatkan

ketidakpastian di baris paling depan, sehingga seluruh tubuh berita dibaca melalui lensa keraguan tersebut. *Republika*, di sisi lain, cenderung menggunakan judul deklaratif yang afirmatif, sering kali menyertakan atribut yang menekankan keberhasilan, optimisme, atau dukungan luas. Bingkai sintaksis ini menciptakan kesan kepastian dan legitimasi sejak pembaca memulai interaksi dengan teks, sehingga narasi berikutnya diterima sebagai konfirmasi atas impresi awal yang positif.

Perbedaan yang lebih mencolok terlihat pada struktur tematik, yang berkaitan dengan cara wartawan menghubungkan fakta-fakta terpisah menjadi satu narasi yang koheren. *Kompas* secara konsisten menerapkan teknik koherensi tematik dengan mengaitkan beberapa isu yang secara logis tidak berhubungan langsung menjadi satu rangkaian sebab-akibat. Misalnya, pemberitaan mengenai proyek infrastruktur dikaitkan dengan isu tata kelola anggaran, yang kemudian disandingkan dengan pemeriksaan lembaga pengawas, sehingga menciptakan alur naratif yang mengasosiasikan kebijakan dengan potensi penyimpangan. Pengaitan ini dilakukan melalui penggunaan konjungsi kausal, penempatan kutipan strategis, dan pengulangan diksi yang bernada kritis. Strategi ini, meskipun efektif dalam menarik perhatian pembaca yang mengutamakan transparansi, berisiko menyederhanakan kompleksitas kebijakan menjadi narasi hitam-putih yang mengabaikan konteks teknis dan proses birokrasi yang sebenarnya (Eliya, 2019). *Republika* mempertahankan fokus tematik yang sempit dan terisolasi, hanya menyoroti pemenuhan prosedur, capaian kuantitatif, atau pernyataan resmi tanpa menghubungkannya dengan isu eksternal yang berpotensi merusak citra. Bingkai ini menciptakan kesan bahwa objek berita beroperasi dalam ruang yang terproteksi dari kontroversi, sehingga pembaca tidak diajak untuk mempertanyakan implikasi yang lebih luas.

Secara retorik, pemilihan leksikon, idiom, dan elemen pendukung menjadi alat ampuh dalam memperkuat nada pemberitaan. *Kompas* sering menyertakan foto yang menampilkan ekspresi serius, situasi tegang, atau interaksi formal yang minim kehangatan, yang secara visual memperkuat narasi kritis. Penggunaan diksi seperti "diduga", "dipertanyakan", "menuai sorotan", atau "belum jelas" berfungsi sebagai penanda epistemologis yang menempatkan fakta dalam status sementara. *Republika* memilih foto yang menunjukkan interaksi hangat, momen keberhasilan, atau simbol-simbol yang membangkitkan empati, didukung oleh penggunaan idiom yang ringan dan tidak mengancam. Diksi yang dominan bersifat afirmatif, seperti "terbukti", "menuai apresiasi", "komitmen kuat", atau "optimis", yang berfungsi sebagai penanda ontologis yang menegaskan kepastian. Strategi retorik ini, sebagaimana dijelaskan oleh Entman (1993), bekerja dengan cara menonjolkan aspek tertentu dari realitas sambil mengaburkan aspek lainnya, sehingga membentuk penilaian moral yang spesifik di kalangan audiens.

3. Bias Ideologis dalam Produksi Berita

Divergensi konstruksi bahasa dan framing yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui analisis tekstual. Ia harus ditempatkan dalam kerangka struktural yang lebih luas, yaitu hubungan antara kepemilikan media, kebijakan redaksional, dan afiliasi ideologis. Teori hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese (2016) menegaskan bahwa level organisasi dan ideologi merupakan faktor penentu paling kuat dalam membentuk isi media, terutama dalam konteks pemberitaan politik yang sensitif. *Kompas*, dengan akar sejarah yang berawal

dari perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai humanisme yang kuat, secara institusional mengedepankan jurnalisme yang kritis, independen, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Kebijakan redaksionalnya secara eksplisit menekankan pentingnya verifikasi ketat, pemisahan fakta dan opini, dan keberanian untuk menguji klaim kekuasaan. Logika ini secara alamiah menghasilkan pemberitaan yang cenderung skeptis terhadap narasi resmi, terutama ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara janji dan realisasi, atau ketika terdapat pertanyaan mengenai tata kelola sumber daya publik.

Di sisi lain, Republika lahir dari gerakan intelektual Muslim yang secara sadar mengemban misi sebagai media yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga membimbing dan memperkuat identitas komunitas. Kebijakan redaksionalnya menekankan pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kerakyatan, yang secara praktis diterjemahkan ke dalam preferensi pemberitaan yang mendukung tokoh atau kebijakan yang dianggap selaras dengan aspirasi umat. Kepemilikan media, yang terhubung dengan jaringan organisasi massa dan lembaga pendidikan, turut memperkuat logika editorial yang lebih mengutamakan afirmasi dan legitimasi daripada kritik dekonstruktif. Hal ini tidak berarti bahwa Republika mengabaikan fakta, melainkan bahwa pemilihan fakta yang dianggap layak untuk ditonjolkan sudah melalui penyaring ideologis yang mendefinisikan apa yang dianggap "bermanfaat", "membangun", atau "representatif" bagi khalayak sasaran (Pawito, 2014). Dalam konteks ini, bias tidak selalu berarti kebohongan atau manipulasi sengaja, melainkan lebih merupakan konsekuensi logis dari posisi sosial dan misi organisasi yang berbeda.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa objektivitas jurnalistik bukanlah kondisi absolut yang dapat dicapai secara mekanis, melainkan sebuah cita-cita yang terus-menerus dinegosiasikan dalam batas-batas struktural. Media tidak beroperasi secara independen, melainkan dipengaruhi oleh dinamika pasar, tekanan politik, dan ekspektasi audiens. Ketika dua media dengan logika ideologis yang berbeda melaporkan peristiwa yang sama, hasil akhirnya bukan dua versi fakta yang saling melengkapi, melainkan dua realitas yang bersaing untuk mendapatkan pengakuan publik. Kompetisi ini, jika tidak dikelola dengan prinsip etika dan transparansi, berpotensi mengikis kepercayaan terhadap institusi pers secara keseluruhan dan mendorong khalayak untuk mencari konfirmasi di ruang gema yang semakin tertutup. Oleh karena itu, pengakuan terhadap adanya bias struktural bukanlah bentuk pesimisme terhadap jurnalisme, melainkan langkah pertama menuju praktik yang lebih reflektif, bertanggung jawab, dan sadar akan dampak sosial dari setiap pilihan kata dan bingkai naratif.

4. Implikasi terhadap Literasi Media dan Dinamika Wacana Publik di Era 2026

Temuan penelitian ini memiliki relevansi yang semakin mendesak ketika diproyeksikan ke dalam konteks komunikasi tahun 2026. Meskipun fase kontestasi politik tahun 2024 telah berlalu, jejak konstruksi bahasa yang dibangun oleh media pada periode tersebut masih menjadi bahan bakar bagi narasi digital yang terus bersirkulasi di platform media sosial, forum daring, dan grup percakapan tertutup. Mekanisme algoritma yang mengutamakan keterlibatan emosional cenderung memperkuat konten yang memiliki nada kritis tajam atau afirmasi kuat, sehingga divergensi pemberitaan masa lalu justru diamplifikasi dalam ruang digital saat ini. Masyarakat yang mengonsumsi berita tidak lagi berada dalam satu ekosistem informasi yang terpusat, melainkan terfragmentasi ke dalam komunitas-komunitas yang saling memperkuat keyakinan awal mereka melalui

konfirmasi selektif (Boer, Pratiwi, & Muna, 2020). Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengenali pola tindak tutur, mengidentifikasi strategi framing, dan memahami latar belakang ideologis media menjadi kompetensi literasi yang tidak boleh dianggap remeh.

Literasi media di tahun 2026 tidak lagi cukup hanya dengan mengajarkan cara memverifikasi fakta atau mengenali berita palsu. Ia harus menyentuh dimensi pragmatis dan kognitif yang lebih dalam, yaitu kemampuan untuk membaca maksud di balik pilihan diksi, memahami bagaimana struktur naratif membentuk penilaian moral, dan menyadari bahwa setiap pemberitaan adalah hasil dari serangkaian keputusan yang dipengaruhi oleh konteks struktural. Pendidikan literasi harus menggeser fokus dari sekadar "apa yang benar" menjadi "bagaimana kebenaran dikonstruksi", sehingga khalayak tidak menjadi konsumen pasif yang mudah terombang-ambing oleh narasi yang terbingkai secara emosional. Di sisi lain, praktisi jurnalis dituntut untuk kembali pada prinsip kesantunan berbahasa yang tidak berarti menghindari kritik, tetapi memastikan bahwa kritik tersebut disampaikan dengan proporsi yang adil, berlandaskan verifikasi ketat, dan tidak menjurus pada penghancuran karakter yang berpotensi memicu konflik horizontal. Kode etik jurnalistik harus dioperasionalkan tidak hanya sebagai aturan prosedural, melainkan sebagai panduan reflektif yang mengingatkan jurnalis akan dampak psikologis dan sosial dari setiap tuturan yang mereka produksi (Sudrajata & Rohida, 2022).

Pergeseran ini menjadi semakin krusial mengingat berkembangnya teknologi kecerdasan buatan yang kini mampu menghasilkan teks berita, ringkasan peristiwa, dan bahkan analisis opini secara otomatis. Jika manusia tidak lagi mampu membedakan antara narasi yang dibangun melalui pertimbangan etis dan narasi yang dihasilkan oleh algoritma yang hanya mengoptimalkan keterlibatan, maka ruang publik berisiko kehilangan kapasitasnya untuk deliberasi rasional. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap dinamika bahasa pragmatik dan framing media bukan hanya alat akademis, melainkan kebutuhan demokratis yang mendesak. Dengan membekali publik dan praktisi media dengan kerangka analisis yang kritis, reflektif, dan kontekstual, ekosistem informasi dapat bergerak dari polarisasi destruktif menuju koeksistensi yang mengakui kompleksitas realitas tanpa mengorbankan integritas kebenaran (McQuail, 2010).

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan tiga langkah konkret. Pertama, institusi pers perlu mengintegrasikan pelatihan pragmatik bahasa dan etika framing ke dalam kurikulum pengembangan jurnalis muda, sehingga kesadaran akan dampak psikologis dan sosial dari pilihan tuturan menjadi bagian dari kompetensi inti, bukan sekadar tambahan. Kedua, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil harus merancang modul literasi media yang tidak hanya berfokus pada verifikasi fakta, tetapi juga pada dekonstruksi narasi, pengenalan strategi persuasi tersembunyi, dan pemahaman tentang hierarki pengaruh dalam produksi berita. Ketiga, regulator dan dewan pers perlu mempertimbangkan revisi pedoman etika yang lebih eksplisit mengatur penggunaan tindak tutur ekspresif dalam berita keras, dengan menekankan prinsip proporsionalitas, konteks, dan penghormatan terhadap martabat subjek berita tanpa mengorbankan fungsi kontrol sosial.

Refleksi kontemporer terhadap kondisi tahun 2026 semakin menegaskan urgensi rekomendasi tersebut. Ekosistem informasi saat ini tidak lagi didominasi oleh media arus utama, melainkan oleh jaringan platform digital yang mengoptimalkan algoritma untuk keterlibatan, bukan kebenaran. Narasi yang terbingkai secara emosional, baik yang kritis

maupun afirmatif, cenderung mendapatkan amplifikasi lebih besar karena memicu respons afektif yang kuat. Dalam konteks ini, kemampuan untuk membaca bahasa secara pragmatis menjadi benteng terakhir terhadap fragmentasi wacana dan polarisasi algoritmik. Masyarakat yang literat secara pragmatis tidak akan mudah terbawa oleh judul yang provokatif atau kutipan yang terpotong, karena mereka memahami bahwa makna tidak terletak pada kata tunggal, melainkan pada hubungan antara tuturan, konteks, dan tujuan komunikatif. Jurnalisme yang bertanggung jawab, di sisi lain, harus kembali pada prinsip bahwa objektivitas bukanlah ketiadaan nilai, melainkan kejujuran dalam mengakui perspektif, transparansi dalam metode, dan keberanian untuk menyajikan kompleksitas tanpa menyederhanakannya menjadi dikotomi yang menyesatkan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam cara membangun citra Anies Baswedan. Kompas secara konsisten menampilkan pandangan yang lebih kritis melalui dominasi tindak tutur ekspresif berupa menyalahkan serta pelanggaran terhadap maksim kesantunan, sehingga kebijakan yang diberitakan diposisikan sebagai bentuk penyimpangan administratif. Sebaliknya, Republika membangun citra yang lebih positif melalui tindak tutur memuji dan kepatuhan terhadap maksim kesantunan untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan Anies. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar variasi dalam gaya pemberitaan, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kebijakan redaksi, dan sasaran pembaca masing-masing media. Perbedaan cara pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan cara pandang dan polarisasi di masyarakat karena dua media yang sama-sama mengklaim objektivitas menyajikan realitas yang bertolak belakang. Oleh sebab itu, kemampuan masyarakat untuk mengenali maksud penggunaan bahasa dan bias dalam pemberitaan menjadi bagian penting dari literasi digital. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada dua media arus utama, sehingga belum menggambarkan dinamika wacana di media sosial maupun media independen. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak bertujuan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan memanfaatkan analisis komputasional berbasis Natural Language Processing (NLP) untuk mengkaji pola pragmatik pada data yang lebih luas, serta melakukan penelitian longitudinal untuk melihat perubahan pola pembingkai pada periode politik berikutnya.

REFERENSI

- Alamsyah, F. F. (2020). Representasi, ideologi dan rekonstruksi media. *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 92–99. <https://doi.org/10.31764/jail.v3i2.2540>
- Anindita, L., Jasit, M. G., & Asrinaldi. (2022). Dominasi elite dalam fungsi rekrutmen politik (Analisis terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem). *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 639–655.
- Astriani, R. A., & Prayitno, H. J. (2021). Tindak tutur ekspresif komentar masyarakat dalam video YouTube Kompas TV keefektifan belajar di rumah. *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.15294/lingua.v17i1.25341>

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait Covid-19 di media online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85–104. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Bungin, B. (2001). *Imajinasi media massa, konstruksi dan makna realitas sosial iklan televisi dalam masyarakat kapitalis*. Jendela.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Curran, J., & Gurevitch, M. (1991). *Mass media and society*. Edward Arnold.
- Eliya, A. (2019). *Framing: Jurus slick menjebak pembaca*. Bandung: Lontar Digital Asia.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media* (Edisi ke-7). LKis Printing Cemerlang.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Gunadha, R., & Nofiana, F. (2022, January 26). Dimintai tanggapannya soal isu SARA, Ganjar: Kalau enggak bisa nyenengin minimal jangan nyakitin. Suara.com. <https://www.suara.com/news/2022/01/26/160709/dimintai-tanggapannya-soal-isu-sara-ganjar-kalau-enggak-bisa-nyenengin-minimal-jangan-nyakitin>
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications & Open University.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi realitas politik dalam media massa (Studi pesan politik dalam media cetak pada masa Pemilu 1999). *MAKARA, Sosial Humaniora*, 8(1), 21–32. <https://doi.org/10.7454/mssh.v8i1.77>
- Haris, A., Amalia, A., & Hanafi, K. (2022). Citra politik Anies Baswedan di media massa. *Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 15–24. <https://doi.org/10.36341/cm.v7i2.2631>
- Jufrizal, Karerek, & Jamali. (2022). Analisis framing pemberitaan Anies Baswedan tentang isu korupsi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 479–484. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.3465>
- Kun, W. (2022). *Komunikasi massa kajian teori dan empiris*. Jember: UIN Khas Press.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-prinsip pragmatik* (M. D. D. Oka, Penerj.). Universitas Indonesia Press.
- Mahdi, A. (2015). Berita sebagai representasi ideologi media (Sebuah telaah kritis). *AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah*, 9(2), 206–217. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.324>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. SAGE Publications, Ltd.
- Munawaroh, R. (2014). Penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Analisis wacana pemberitaan pada surat kabar harian Republika edisi Juni-Desember 2013) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2605/>
- Mukhlas, M. (2022). *Retorika politis dalam media massa*. CV. Pustaka Felicha.

- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Pawito. (2014). Meneliti ideologi media: Catatan singkat. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 6–14.
- Raharjo, A. (2022). Pengamat: Anies berpotensi jadi target framing politik identitas. *Republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/re32ax436/pengamat-anies-berpotensi-jadi-target-framing-politik-identitas>
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609213>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2016). A media sociology for the networked public sphere: The hierarchy of influences model. *Mass Communication and Society*, 19(4), 389–410. <https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1174268>
- Sudrajata, T., & Rohida, L. (2022). Efek media massa dalam pembentukan opini publik di masa pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 1, 519–524. Universitas Putera Batam.